



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

GEDUNG SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA II LT 12, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4,
JAKARTA 10710, TELEPON 3442960, FAKSIMILE 3442960, SITUS www.djkn.kemenkeu.go.id

SIARAN PERS

**Dukung Pemberantasan Korupsi,
DJKN Lelang Barang Rampasan KPK**

Jakarta, 22 September 2017 – Dukungan DJKN memberantas tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan melalui Lelang Barang Gratifikasi. Diadakan di Jakarta Covention Center, Jumat (22/9), DJKN menggelar lelang barang rampasan KPK yang dibuka pukul 13.30 WIB.

Pada Lelang Eksekusi yang dilakukan DJKN atas permohonan KPK ini terdapat 595 peserta yang bersaing menyebutkan nominal harga untuk memiliki barang yang ditawarkan. Dari 22 barang yang ditawarkan, 21 barang, telah laku terjual. Rp. 3.481.500.000 ditambah 3% bea lelang masuk ke kas negara.

Mulai dari handphone hingga mobil dilelang dalam acara ini. Barang-barang tersebut diantaranya handphone merk Samsung, Apple type iPhone 5, Blackberry, Motor Kawasaki Ninja serta mobil dengan berbagai merk yaitu Jaguar XJL 3.0 VG AT, Toyota Alphard 2.4 AT, Audi A5 2.0 TFSI AT, VW Golf 1.4, VW Beetle 1.2, Honda CRV 2.4, Honda Civic FD2 2.0, Suzuki Swift, Toyota Rush 1.5 S AT, Toyota Avanza 1500 S, Jeep Wrangler 4.OL AT, Honda HRV, serta koper merk rimowa, tas chanel made in italy

Lelang ini merupakan perintah Undang-Undang (UU), yakni Lelang eksekusi yang berasal dari barang sitaan Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Lelang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III yang merupakan unitkerja vertikal DJKN, dan ketentuan lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Permohonan Lelang Eksekusi Rampasan ini diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI, Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan.

Jakarta, 22 September 2017

TTD

Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat
Tri Wahyuningsih Retno Mulyani